

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu sektor terkuat dan terbesar dalam sistem perekonomian dunia. Sektor ini telah menjadi pendorong utama negara dalam mencapai keuntungan yang mampu memberikan devisa yang cukup besar. UNWTO (2001, 1) mendefinisikan “Pariwisata sebagai aktivitas orang yang berpergian ke suatu tempat dan tinggal diluar lingkungan biasanya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan aktivitas yang dibayar dari dalam tempat” (Terj. Peneliti). Saat ini, walaupun menjadi salah satu istilah yang paling umum digunakan ketika menganalisis fenomena pariwisata, seseorang tidak dapat menyatakan bahwa terdapat definisi tunggal yang diterima secara umum atau bahkan pendekatan terhadap istilah tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, pariwisata menjadi pusat perhatian bagi para sektor swasta dunia dengan menarik keuntungan melalui pengembangan dan produksi layanan serta produk untuk turis maupun pengunjung. Dari segi sektor publik yang diwakili oleh pemerintah, mereka menyadari bahwa pentingnya ekonomi pariwisata, terutama sebagai “mesin pekerjaan” dan sumber pendapatan pajak. Besarnya minat yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pariwisata dari sektor swasta, hingga berbagai struktur pemerintah. Industri pariwisata sendiri terdiri dari pengelompokan perusahaan yang didefinisikan

dengan bisnis yang menjual atau melayani wisatawan. Hotel, restoran, transportasi dan hiburan menjadi contoh jenis perusahaan yang membentuk industri pariwisata.

Sebutan “Surga Wisata” bagi kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan sumber kekayaan yang berlimpah sehingga kawasan ini menjadi sektor favorit bagi turis mancanegara. Kawasan yang menjadi destinasi utama pariwisata di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand berdasarkan data BPS 2017 (Sabon et all 2018, 164). Indonesia menjadi salah satu kawasan ASEAN yang menjadi tujuan para turis asing maupun domestik. Sektor ini sebagai salah satu kunci dalam mendorong perekonomian negara yang mampu menyumbang cukup besar devisa negara. Selain itu, sektor ini juga menyediakan lapangan pekerjaan serta memperkenalkan budaya asal negara. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia berdasarkan kebangsaan paling banyak berasal dari Malaysia, diikuti Tiongkok, Singapura, Australia dan Timor Leste (2019, 6).

Gambar 1.1

Peta Kawasan Indonesia



Sumber : (Dakira 2019)

Besarnya tingkat kunjungan wisatawan asing menjadi persoalan yang rumit bagi pemerintah Indonesia. Pariwisata dapat memberikan manfaat yang positif melalui perlindungan sumber daya alam dan buatan bumi melalui pengawetan satwa liar, pemulihan lokasi historis, *landmark*, dan pelestarian lingkungan yang masih asli. Selain itu, juga memberikan dampak sosial dan budaya yang menguntungkan, melalui pengenalan dan mempromosikan budaya yang khas dan meningkatkan kesadaran lokal akan tradisi adat. Pariwisata telah membantu membangkitkan kesenian dan kerajinan tangan dari beberapa komunitas dan menciptakan permintaan bagi pusat-pusat kinerja dan toko kerajinan industri.

Untuk lebih memfasilitasi perencanaan pariwisata, sejumlah faktor eksternal terhadap perkembangan juga harus mempertimbangkan dampak negatif, Faktor-faktor yang harus dihadapi pariwisata *global*, regional dan domestik yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan pariwisata meliputi perubahan sosiodemografi, kemajuan teknologi, perubahan politik, pariwisata berkelanjutan dan masalah lingkungan, masalah keselamatan dan Kesehatan manusia serta pengembangan sumber daya manusia. Tantangan saat ini, pariwisata sedang dilanda banyak tekanan seperti peristiwa dunia, masalah anggaran dan defisit yang meningkat, resesi, pendidikan, kesehatan, kebutuhan sosial dan pencegahan kejahatan, serta pasar pariwisata yang matang dan kompetitif.

Upaya besar telah dilakukan untuk melegitimasi pariwisata sebagai industri utama dalam ekonomi dan jasa saat ini. Secara besar-besaran upaya ini berhasil,

namun, kesuksesan tidak menjadi tolak ukur pariwisata. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pasar pariwisata seperti eksploitasi. Dengan peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dalam industri dan jangkauan global, pariwisata menghadapi suatu fenomena sosio-kultural yang berfokus pada hak asasi manusia. Peningkatan akan permintaan seksualitas terhadap anak menjadi suatu catatan kelam di industri pariwisata.

Isu pariwisata telah menjadi pusat perbincangan dengan kata lain bahwa 'pariwisata adalah prostitusi' (Kibicho 2009, 79.). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa negara-negara miskin sebagai tujuan pariwisata menyediakan orang dewasa maupun anak-anak untuk di eksploitasi kepada negara-negara kaya penghasil turis. Praktik prostitusi di destinasi wisata melibatkan anak-anak berdasarkan bentuk transaksinya. Pada Pasal 76 I, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak" (DPR & Presiden Republik Indonesia 2014, 41). Dalam Pasal 88 Undang-Undang No.35 Tahun 2014, sanksi yang diterima oleh pelaku pelanggaran Undang-Undang di atas, akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Graburn 1983 (Kibicho 2009, 79) melihat negara-negara miskin dipaksa menjadi budak untuk dapat menghasilkan uang, sedangkan wisatawan luar hanya mencari kesenangan dari negara-negara yang dikunjungi. Perdagangan seks memiliki *multiplier-effect* yang dapat menguntungkan berbagai individu serta

banyak sektor ekonomi. Mereka didorong untuk membuka transaksi komersial dengan jenis yang khusus. Transaksi seksual pariwisata terjadi akibat dorongan permintaan wisatawan domestik dan maupun asing melalui besarnya jumlah promosi yang dilakukan oleh penyedia layanan seksual ataupun *prostitution supplier*.

Kegiatan promosi dapat dilakukan baik secara daring maupun luar jaringan. Transaksi seksual secara daring dilakukan dengan memanfaatkan media seperti *Facebook, Instagram, Michat*, maupun media sosial lainnya yang dapat mendukung transaksi seksual. Berbeda dengan transaksi sebelumnya, transaksi seks luar jaringan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung penyedia jasa maupun mendatangi tempat seperti kompleks-kompleks pelacuran, lokalisasi dan tempat-tempat lainnya seperti *cafe* remang-remang serta diskotik kecil. Pelaku bisnis perhotelan, operator restoran, supir taksi, tur dan maskapai penerbangan berpartisipasi sebagai penyedia jasa. Dalam dunia pariwisata, eksploitasi seksual ini bertentangan dengan poin utama dari industri pariwisata. Dengan demikian, eksploitasi anak sangat ditentang dan pelaku eksploitasi dapat menghadapi hukuman yang berat,. Sehingga, isu tersebut belum dapat teratasi secara maksimal (Faisal 2015, 626-633).

Transaksi seksual di kawasan wisata terhadap anak-anak umum dikenal sebagai Pariwisata Seksual Anak (PSA). Pariwisata Seks (*Sex Tourism*) pada umumnya digambarkan sebagai bentuk perjalanan individu dengan tujuan untuk mendapatkan layanan terkait seks komersial dari tujuan asal negara/wilayah. PSA salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dari hasil peralihan nilai pariwisata

terhadap anak. Bentuk ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seks dan pariwisata memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain sebagai bentuk ESKA. ESKA adalah proses memperlakukan anak sebagai objek seksual komersial, dalam bentuk perbuatan atau tindakan secara paksa dan kekerasan.

Selama 15 tahun terakhir, ESKA menjadi perhatian bagi media dan masyarakat.. Permasalahannya ialah baik wisatawan asing, domestik yang berlibur di kawasan dengan memberi pengaruh negatif seperti memanfaatkan anak sebagai jasa pemuas seksual. Pengaruh ini dapat memberikan peralihan sosial, yang mengarah pada perubahan yang kurang diinginkan seperti peralihan nilai pariwisata.

Kasus ESKA dibagi dalam dua faktor yaitu, secara eksternal dan internal yang di mana secara eksternal dipengaruhi pada permintaan dari wisatawan. Permintaan ini berhasil karena adanya promosi yang berasal dari penyedia jasa prostitusi. Sedangkan secara internal dapat disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang dijelaskan dalam Jurnal Ann Brooks dan Vanessa Heaslip berjudul *Sex Trafficking and Sex Tourism in a globalised world* (2019, 5), paling rentan dalam industri ini ialah individu hidup dalam kemiskinan, yang paling mungkin terpapar untuk bekerja di industri tersebut ataupun memang mengalami perdagangan seks. Perkembangan isu ini juga telah difasilitasi oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata. Pesatnya perkembangan ekonomi di daerah perkotaan telah mengakibatkan masuknya migrasi dalam jumlah besar dan sebagian besar pekerja seks berasal dari pedesaan.

Jenis eksploitasi ini dapat terjadi dimana saja dan tidak ada satu negara yang kebal terhadap pariwisata seks anak. Setiap negara memiliki reputasi masing-masing terhadap daerah-daerah tujuan serta pengirim. Ini dapat dilihat dari beberapa negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Jepang memiliki reputasi dalam mengirimkan turis seks. Sedangkan negara bagian lain, terutama Thailand dan Filipina, terkenal sebagai tujuan wisata seks. Berdasarkan laporan dari *International Labour Organization (ILO)* ada sekitar 20.9 juta korban eksploitasi di dunia, dan dari jumlah tersebut sekitar 26% atau 5,5 juta korbannya adalah anak-anak (Subarkah 2018, 67-81). Melalui *World Economic Forum* dinyatakan bahwa daya saing pariwisata Indonesia di dunia telah naik menempati peringkat 40, yang pada tahun 2017 sebelumnya berada pada peringkat ke-42. Selain itu, Indonesia juga meraih peringkat 40 dari 140 negara di dunia dan di Asia Tenggara sendiri, Indonesia menempati peringkat ke-4. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Kementerian Pariwisata mengenai data terbaru Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Agustus 2019 yang meningkat 2,94% (ECPAT Indonesia 2019, 1).

Berdasarkan data ECPAT Indonesia, pada tahun 2016, terdapat 335 anak dengan 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki mengalami eksploitasi seksual (ECPAT Indonesia 2016, 1). ECPAT juga mendata di tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah 340 korban eksploitasi seksual anak (ECPAT Indonesia 2018, 1). Pada tahun 2018, kasus ESKA mengalami penurunan sebesar 329 kasus yang dimana 71% kasus tersebut dialami anak perempuan

(ECPAT Indonesia 2019, 1). Dalam data KPAI tahun 2019 dan 2020 (Maradewa 2020, 1), terjadi peningkatan kasus sebesar 244 kasus.

Sebagian besar kasus terjadi di berbagai wilayah yang sering dikunjungi wisatawan seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Pulau wisata seperti Bali telah dianggap sebagai lokasi pariwisata seks anak serta menjadi tujuan utama bagi wanita dan anak-anak perempuan untuk diperdagangkan. Menurut Departemen Pariwisata Indonesia antara tahun 1972 dan 2008, 2013, sekitar 707 anak-anak mengalami eksploitasi seksual di tempat wisata yaitu 40 desa dan 6 provinsi, termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah, Barat dan Timur (Ecpat Internasional 2011, 12-13).

Sektor pariwisata mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dimana memberikan dampak positif bagi negara namun juga membawa dampak negatif. Perkembangan pariwisata, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya daerah tujuan wisata. Wisatawan yang mengeluarkan sejumlah uang mulai dari transportasi hingga membeli produk atau jasa di wilayah tujuan wisata, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cenderamata, kegiatan rekreasi dan sebagainya. Sehingga, hal tersebut dapat menghasilkan efek pada bisnis dan ekonomi. Meningkatnya permintaan pada produk dan jasa akan menarik investor asing untuk dapat menanamkan modal seperti pembangunan penginapan atau hotel, restoran, taman rekreasi dan sektor lainnya.

Sehingga, selain penyumbang devisa negara sektor ini akan memberikan keuntungan lainnya seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, melakukan pembangunan, serta mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk. Berbeda dari penjelasan diatas, dampak negatif pada pariwisata kemungkinan akan melibatkan anak-anak yang rentan dijadikan objek eksploitasi seksual. Indonesia dianggap sebagai negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia. Hal ini merupakan tujuan wisatawan dan pariwisata seks terjadi di beberapa daerah. Dalam praktiknya, kekerasan dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan berlangsung di destinasi wisata dan wisatawan dapat menggunakan fasilitas wisata yang ada untuk mendukung isu ini. Dalam hal tanggung jawab moral dan etika, industri pariwisata dan perhotelan memiliki tanggung jawab sosial dalam menangkul perdagangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekan perlunya industri pariwisata dan perhotelan untuk membantu menghentikan perdagangan seks.

Kejahatan ESKA dalam pariwisata menjadi tantangan penting bagi perjalanan pariwisata Indonesia. Isu ini telah menjadi fokus utama bagi negara sehingga membangun suatu hubungan organisasi dan individu yang berusaha untuk menekan kasus ESKA. Sebagai respon, *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) hadir di berbagai negara dunia terutama Indonesia dengan melakukan berbagai bentuk program yang berfokus pada upaya advokasi untuk menaikkan kesadaran mengenai bentuk ESKA (ECPAT Internasional 2008, 4). Isu ini menjadi fokus utama ECPAT, yang dimulai dengan kampanye menentang pariwisata seks anak. Dalam bentuk kampanye,

ECPAT telah tumbuh dan menggerakkan perhatian masyarakat, dan keterlibatan pemerintah beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seluruh wilayah bagian.

Dalam upaya menekan tingginya angka kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak oleh wisatawan, ECPAT telah melakukan koordinasi dan kerja sama melalui aksi internal dan internasional bersama pemerintah, masyarakat, LSM dan swasta untuk menentang pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak. Melihat meluasnya kasus ESKA di Indonesia dalam sektor pariwisata, ECPAT bekerja sama dengan pemerintah, organisasi Nonpemerintah, swasta serta masyarakat mengambil langkah cepat dalam menangani kasus di atas. ECPAT Indonesia merupakan jaringan yang berfokus pada penghapusan prostitusi, pornografi, serta perdagangan untuk tujuan seksual di wilayah Indonesia. Dengan adanya komitmen untuk bekerjasama, tahun 2005, Indonesia resmi berasosiasi dengan ECPAT Internasional. Pada tahun 2012, jaringan ini resmi tercatat sebagai bagian resmi ECPAT Internasional.

Dari rangkaian uraian diatas, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini dikarenakan peneliti lebih menganalisis peranan ECPAT bersama pemerintah, organisasi Nonpemerintah, swasta dan LSM dalam menangani kasus ESKA di Indonesia dari sektor pariwisata. Peranan ini ditunjukkan atas hal yang mendasari terbentuknya kerja sama tersebut sehingga kemudian dapat diukur melalui efektivitas. Efektivitas dapat diukur melalui proses maupun implementasi atas kerja sama yang terjalin dalam mengatasi kasus diatas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terlihat adanya kegiatan eksploitasi seksual anak yang terjadi dalam lingkup pariwisata. ECPAT Internasional melalui ECPAT Indonesia sebagai organisasi yang bergerak dalam memberantas isu eksploitasi seksual komersial anak juga ikut melibatkan berbagai lembaga serta institusi pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan, yaitu :

- 1. Bagaimana peranan ECPAT dalam mencegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di industri pariwisata di Indonesia?*
- 2. Bagaimana efektivitas ECPAT dalam mencegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kalangan Pariwisata Indonesia?*

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran ECPAT dalam menangani seks anak industri pariwisata Indonesia, dan efektivitasnya dalam menangani isu tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mengangkat isu mengenai peran ECPAT dalam menangani masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di industri pariwisata di Indonesia, maka penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian mengenai peranan ECPAT dalam menangani masalah ESKA di pariwisata di Indonesia. Kajian ini memberikan sumbangan, pemikiran dan konsep-konsep, teori-teori terhadap studi empiris bagi para penstudi Hubungan Internasional dalam bidang keamanan nasional, serta sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan bagi pihak lain yang ingin memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional, untuk menaruh minat terkait kasus yang diangkat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, tidak hanya pemerintah Indonesia dan organisasi internasional namun juga masyarakat sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya. Kasus ini telah menarik perhatian secara nasional, bahkan internasional. Melalui kajian ini, diharapkan peran ECPAT efektif dalam menangani kasus di atas sehingga dapat memberikan dan menambah wawasan bagi para peneliti Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa/siswi, dosen dan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode ini menitikberatkan pada kegiatan penelitian ilmiah dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) oleh sejumlah individu maupun kelompok orang terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.

Pemahaman ini bukan hanya berasal dari sudut pandang peneliti (*researcher's perspective*) tetapi yang lebih penting ialah pemahaman terhadap gejala dan faktor yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti (Hardani, *et al.* 2020). Penelitian kualitatif telah melibatkan masalah yang perlu dieksplorasi dan diproses berdasarkan upaya-upaya penting seperti pengajuan pertanyaan (wawancara, observasi, dokumen dan materi audiovisual), pengumpulan data serta menganalisis data secara induktif mulai hal khusus hingga perspektif yang lebih umum serta menginterpretasikan makna data tersebut.

Peneliti di sini berfokus kepada peran ECPAT dalam menangani masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di industri pariwisata di Indonesia. Kerja sama ECPAT juga akan dijelaskan oleh peneliti sebagai bentuk peranan dan efektivitas ECPAT.

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk memahami makna, keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan dan menunjukkan fenomena ESKA oleh ECPAT Indonesia.

Peneliti juga menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini jenis ini adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek yang kemudian diteliti melalui data yang diperoleh dengan memusatkan fokus kepada masalah yang diteliti, hasil kemudian akan diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil dari objek yang diteliti (Sugiyono 2020, 28).

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (di mana peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, ataupun sumber ilmiah lainnya (Siyoto 2015, 58). Peneliti akan menggunakan sumber data dari bahan bacaan jurnal ilmiah, buku, serta informasi internet. Peneliti menggunakan bahan bacaan yang berhubungan dengan peranan ECPAT dalam menangani masalah ESKA di kalangan pariwisata di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang tersedia dari berbagai sumber berupa jurnal, laporan, kebijakan, biografi, sejarah kehidupan (*life histories*) maupun gambar berupa grafik yang digunakan untuk melengkapi data hasil observasi. Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono 2020, 123).

Tabel 1.1

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sekunder	Dokumentasi	<p>a) Penelaah dan pencatatan isi buku dan jurnal mengenai eksploitasi seksual anak (ESKA), gambaran pariwisata seks di indonesia.</p> <p>b) Penelaah dan pencatatan isi dokumen pemerintah maupun</p>	<p>a. Data terkait ECPAT</p> <p>b. Data terkait eksploitasi seksual anak (ESKA), pariwisata seks anak, kerja sama, efektivitas</p>
----------	-------------	--	--

		<p>Nonpemerintah mengenai upaya penyelesaian isu yang melibatkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional serta LSM.</p> <p>c) Penelaah dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan di internet mengenai pencapaian sasaran maupun tujuan guna melakukan pengukuran efektivitas</p>	
--	--	--	--

1.5.3. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian kualitatif ialah suatu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2020, 181). Triangulasi sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam pengujian kredibilitas data yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari beberapa teknik yaitu: (1) Triangulasi Sumber; (2) Triangulasi Teknik; (3) Triangulasi Waktu. Adanya proses Triangulasi ini dapat mempermudah peneliti untuk menguji akurasi data-data yang telah terkumpul.

Peneliti sendiri berfokus dalam memvalidasi sumber-sumber dalam meneliti peranan ECPAT dalam menangani masalah ESKA di kalangan pariwisata di Indonesia. Sehingga, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang di mana peneliti memastikan bahwa tingkat kepercayaan sumber tidak hanya dengan satu sumber, tetapi dengan berbagai sumber lainnya.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan jelas dan analisis data berorientasi untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2020, 130) teknik analisis data melibatkan pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari hasil dokumentasi. Hal ini penting dengan mengelompokkan data tersebut sehingga dapat menarik kesimpulan dengan mudah dan dapat dipahami

Analisis data kualitatif bersifat induktif, di mana didasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian diawali dengan menginterpretasikan tema atau deskripsi setelah itu baca dan lihat keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan dengan mengelompokkan data (*coding all of the data*) untuk dihubungkan antartema dengan susunan berupa data lapangan, gambar dan lain sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini, terdiri dari Bab I yaitu berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, berisi tinjauan Pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran serta argument utama yang menjelaskan kondisi, faktor dan dampak dari ESKA dalam lingkungan pariwisata. Bab III berisi penjelasan yang diawali dengan perkembangan pariwisata, lalu dampak pariwisata seks anak, peranan ECPAT sebagai organisasi dan ditutup dengan pengukuran

efektivitas ECPAT dalam menangani kasus ESKA di industri pariwisata. Dan terakhir Bab IV berisi kesimpulan dan saran terkait dengan topik yang diangkat.

